



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru

+62 761 33073



www.bkd.riau.go.id



email: bkd@riau.go.id



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.E. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR 31

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau
Tahun 2022 dan Capaian Renstra
BKD Provinsi Riau 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 38

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan 39

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau 40

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan
misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti
NSPK, SPM dan SDGs
(Sustainable Development Goals) 43

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 43

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan 43

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 44

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat 49

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 50

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 50

3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB) Republik Indonesia 50

3.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia 51

3.1.3. Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia 52

3.1.4. Komisi Aparatur Sipil Negara 53

3.1.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 54

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 56

3.3. Program dan Kegiatan 56

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 62

BAB V : PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Riau 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 21

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin..... 22

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 24

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin 25

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin 26

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Memasuki Masa Pensiun 26

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Memasuki Masa Pensiun Menurut Jenis Kelamin 27

Tabel 2.9 Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin 27

Tabel 2.10Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Yang Mengikuti Tugas Belajar Menurut Jenis Kelamin 28

Tabel 2.11Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Menurut Jenis Kelamin 29

Tabel 2.12Jumlah ASN Penyandang Disabilitas Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau 29

Tabel 2.13Jumlah ASN Provinsi Riau Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Fungsional 31

Tabel 2.14Sistem Informasi Kepegawaian Yang Ada dan Yang Akan Dikembangkan 33

Tabel 2.15Rekapitulasi Nilai Kinerja SKP PNS Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2022 33

Tabel 2.16Proyeksi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 35

Tabel 2.17 Nilai Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 40

Tabel 2.18 Pemetaan Permasalahan dan Hambatan 40

Tabel 2.19 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Riau 45

Tabel 2.20 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 BKD Provinsi Riau Tahun 2024 49

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 56

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Riau..... 59

Tabel 4.1 Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2024 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja SKPD 2

Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen RKD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja 2

BAB I

PENDAHULUAN

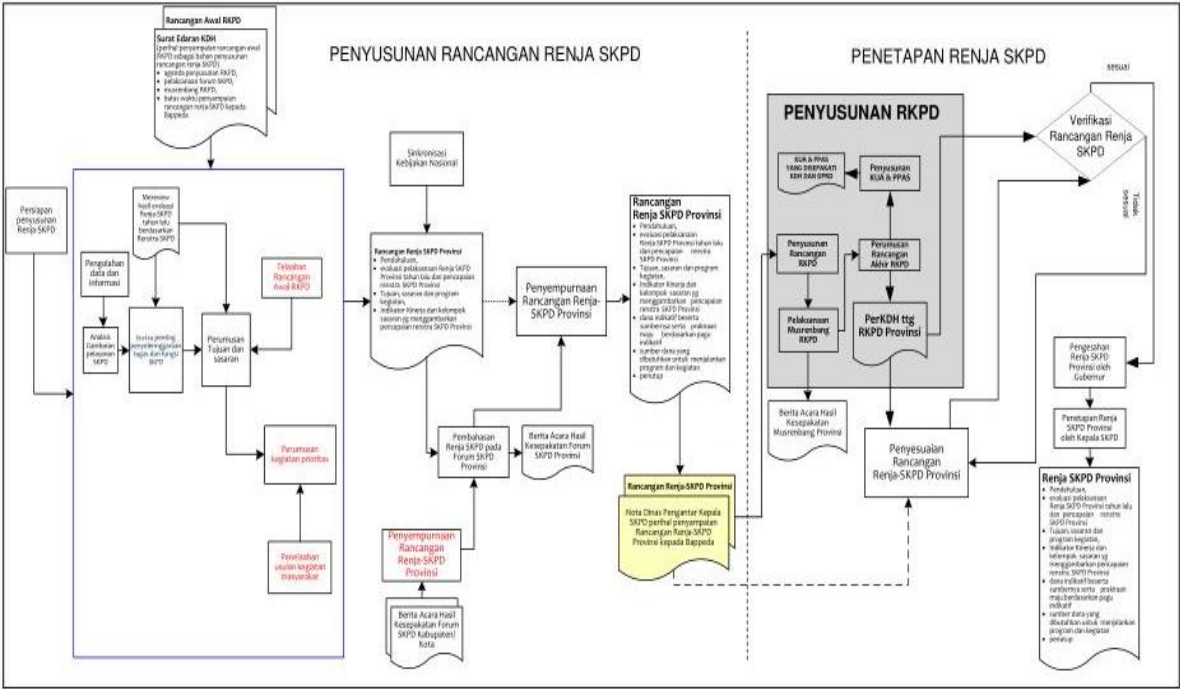
1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

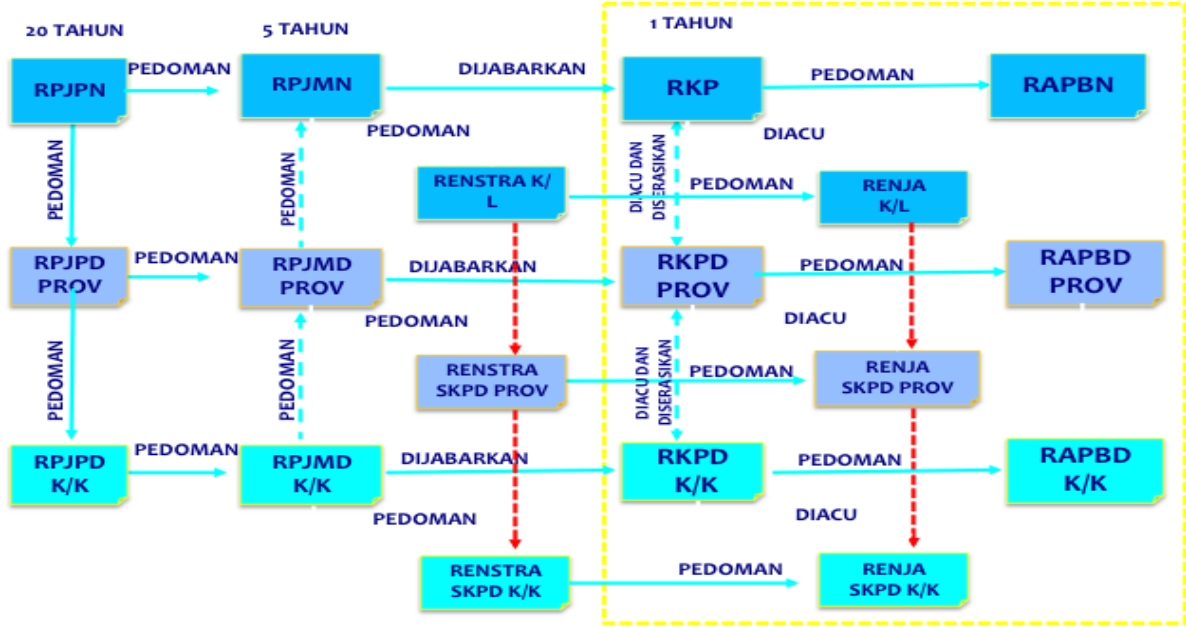
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja SKPD



Gambar 1.2
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja



Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 telah mengamanatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan penunjang urusan yaitu kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

RPJMD sebagai perencanaan pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, perencanaan perangkat daerah 5 tahunan sebagaimana terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih teknis dan operasional dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2023 menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Dalam prosesnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah agar dapat dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Setelah melalui proses verifikasi, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Riau Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang telah diterjemahkan ke dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada realisasi APBD Tahun 2022 dan Tahun 2023, yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 11) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

- 19) Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- 20) Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 30);
- 21) Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);
- 22) Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 31);
- 23) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: Kpts.900/BKD/1.1/XII/2022/1736 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah :

- 1) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2024;
- 2) Sebagai instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2024; yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan subbab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subbab sebagai berikut.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang telah diterjemahkan ke dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada realisasi APBD Tahun 2022 dan Tahun 2023, yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat capaian terhadap target tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta capaian realisasi anggaran pada masing – masing program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan rencana kerja juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan (2023) disajikan dalam format T-C.29 pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Masukkan Prog/Keg/Sub Tahun 2020 (Lihat DPA 2020 Perubahan)	Indikator	Target akumulatif 2020-	realisasi s.d 2020 saja	(Dengan pemahaman bahwa						
TAHUN 2020											
0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
0.0.00.01. 001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2500 Surat	2494	Surat					2494	99,76
0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24 Rekening	24	Rekening					24	100,00
0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	127	Unit					127	1270,00
0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12	Bulan					12	100,00
0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	14	Unit					14	100,00
0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	20 Jenis	25	Jenis					25	125,00
0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 Jenis	50	Jenis					50	200,00
0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	31 Jenis	31	Jenis					31	100,00
0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4620 Porsi	6374	Porsi					6374	137,97
0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	132	Kali					132	82,50
0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	1010 OB	1010	OB					1010	100,00
0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 OB	240	OB					240	86,96
0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	0	Ruang					0	0,00
0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	300	Unit					300	100,00
3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA										
3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2	Dokumen					2	100,00
3.0.03.15.002.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2500 Data elektronik	2500	Data elektronik					2500	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	350	Orang					350	100,00
3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	126 Orang	93	Orang					93	73,81
3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan	1 Dokumen	1	Dokumen					1	100,00
3.0.03.15.008.	Pengelolaan Penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	1 Dokumen	1	Dokumen					1	100,00
3.0.03.15.009.	Penyusunan Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi	Jumlah dokumen analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi yang tersusun	1 Dokumen	1	Dokumen					1	100,00
3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	2 Dokumen	2	Dokumen					2	100,00
3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	1 Dokumen	1	Dokumen					1	100,00
3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	2 Modul	2	Modul					2	100,00
3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	1 Modul	1	Modul					1	100,00
3.0.03.15.015.	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah sertifikat akreditasi UPT penilaian kompetensi Provinsi Riau	1 Sertifikat	1	Sertifikat					1	100,00
3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	350 Orang	449	Orang					449	128,29
3.0.03.15.017.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000 Berkas	6132	Berkas					6132	153,30
3.0.03.15.018.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	598	Orang					598	99,67
3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang	997	Orang					997	99,70
3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	355	Dokumen					355	98,89
3.0.03.15.021.	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus	59	Kasus					59	84,29
3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR										
3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2	Dokumen					2	100,00
3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	1	Dokumen					1	100,00
3.0.03.17.005.	Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	33 Orang	25	Orang					25	75,76
3.0.03.17.006.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I	1 Orang	0	Orang					0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.17.007.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk II	4 Orang	0	Orang					0	0,00
3.0.03.17.008.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	4 Orang	6	Orang					6	150,00
3.0.03.17.009.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	10 Orang	10	Orang					10	100,00
3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi asesor	20 Orang	18	Orang					18	90,00
3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	9	Kali					9	75,00
3.0.03.17.015.	Pembangunan Database Terkait Pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah database yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	1 Data base	1	Data base					1	100,00
2	Masukkan Prog/Keg/Sub Tahun 2021 (Lihat DPA 2021 Perubahan)		Target akumulatif 2021.	Realisasi 2021 saja	(Dengan pemahaman bahwa						
TAHUN 2021											
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum									
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	21 Jenis	21	Jenis					21	100,00
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	15	Unit					15	100,00
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	26 Jenis	26	Jenis					26	100,00
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	7315 Porsi	7310	Porsi					7310	99,93
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	44 Jenis	44	Jenis					44	100,00
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	137 Kali	137	Kali					137	100,00
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2500 Surat	2500	Surat					2500	100,00
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	36 Rekening	36	Rekening					36	100,00
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12	Bulan					12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	562 OB	552 OB					552	98,22
		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	240 OB	240 OB					240	100,00
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara								
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	14 Unit					14	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	311 Ruang	311 Ruang					311	100,00
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit					1	100,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan								
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan								
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100,00
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut	353 Orang	353 Orang					353	100,00
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang difasilitasi	761 Berkas	761 Berkas					761	100,00
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	2 Agenda	2 Agenda					2	100,00
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1 Modul	1 Modul					1	100,00
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2500 Data elektronik	2500 Data elektronik					2500	100,00
			350 Orang	350 Orang					350	100,00
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	1 Modul	1 Modul					1	100,00
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100,00
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	5 Dokumen	1 Dokumen					1	20,00
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4490 Berkas	4490 Berkas					4490	100,00
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen penataan	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100,00
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN								
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100,00
			1 Dokumen	1 Dokumen					1	100,00
			2 Dokumen	2 Dokumen					2	100,00
			20 Orang	20 Orang					20	100,00
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan peningkatan kompetensi	1 Modul	1 Modul					1	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	14 Orang	14 Orang						14	100,00
		Jumlah ASN yang difasilitasi	150 Orang	282 Orang						282	188,00
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	123 Orang	123 Orang						123	100,00
			8 Orang	10 Orang						10	125,00
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I	1 Orang	1 Orang						1	100,00
			5 Orang	5 Orang						5	100,00
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	8 Orang	9 Orang						9	112,50
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	2 Dokumen	2 Dokumen						2	100,00
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						2	100,00
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	16 Orang	17 Orang						17	106,25
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang	1020 Orang						1020	102,00
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikonseling	15 Orang	15 Orang						15	100,00
			12 Kali	12 Kali						12	100,00
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus	57 Kasus						57	81,43
3	Masukkan Prog/Keg/Sub Tahun 2022 (Lihat DPA 2022 Perubahan)		Target akumulatif 2021-	Realisasi 2021 saja							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2022										
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum								
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum								
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	21 Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	21 Jenis	21 Jenis	100,00		21	100,00
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	6 Unit	100,00		6	100,00
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	69 Jenis	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	69 Jenis	69 Jenis	100,00		69	100,00
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9300 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9300 Porsi	9205 Porsi	98,98		9205	98,98
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	39 Jenis	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	39 Jenis	40 Jenis	102,56		40	102,56
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65 Kali	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65 Kali	75 Kali	115,38		75	115,38
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	16 Surat	Jumlah Surat yang Dikirim	16 Surat	16 Surat	100,00		16	100,00
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	3 Rekening	100,00		3	100,00
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	492 Bulan	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	492 OB	456 OB	92,68		456	92,68
		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	240 OB	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	240 OB	240 OB	100,00		240	100,00
		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 OB	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00		12	100,00
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara								
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	100,00		14	100,00
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	145 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	145 Unit	145 Unit	100,00		145	100,00
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruangan	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	2 Ruang	100,00		2	100,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan								
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang								
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00		1	100,00
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	350 Orang	100,00		350	100,00
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Berkas	Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	600 Berkas	100,00		600	100,00
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	3 Agenda	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	3 Agenda	3 Agenda	100,00		3	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1 Modul		1 Sistem	1 Modul	100,00			1	100,00
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2500 Data elektronik Orang		2500 Data elektronik Orang	2500 Data elektronik Orang	100,00			2500	100,00
			350 Orang		350 Orang	350 Orang	100,00			350	100,00
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	1 Modul		1 Modul	1 Modul	100,00			1	100,00
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN									
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			1	100,00
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000 Berkas		4000 Berkas	4000 Berkas	100,00			4000	100,00
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen penataan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			1	100,00
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN									
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pemetaan, evaluasi dan talent pool	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50,00			1	50,00
		Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			1	100,00
		Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00			1	100,00
		Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	1 Modul		1 Modul	1 Modul	100,00			1	100,00
		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100,00			20	100,00
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	18 Orang		18 Orang	18 Orang	100,00			18	100,00
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	2 Orang		2 Orang	2 Orang	100,00			2	100,00
		Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	126 Orang		126 Orang	122 Orang	96,83			122	96,83
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	45 orang		45 orang	45 Orang	100,00			45	100,00
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100,00			1	100,00
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6 Orang		6 Orang	5 Orang	83,33			5	83,33
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	40 Orang		40 Orang	40 Orang	100,00			40	100,00
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00			2	100,00
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00			2	100,00
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang		22 Orang	20 Orang	90,91			20	90,91
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	100,00			1000	100,00
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikonseling	28 Orang		28 Orang	28 Orang	100,00			28	100,00
		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali		12 Kali	12 Kali	100,00			12	100,00
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus		70 Kasus	63 Kasus	90,00			63	90,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Masukkan Prog/Keg/Sub Tahun 2023 (Lihat DPA 2023		Target akumulatif 2023-2024								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
TAHUN 2023													
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum											
5.03.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi											
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket						1	Paket		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum											
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	Paket						1	Paket		
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Paket						3	Paket		
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2	Paket						1	Paket		
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2	Paket						1	Paket		
5.03.01.1.06.057	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket						1	Paket		
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2	Laporan						1	Laporan		
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2	Laporan						1	Laporan		
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24	Laporan						12	Laporan		
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	24	Laporan						12	Laporan		
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara											
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	Unit						7	Unit		
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14	Unit						7	Unit		
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	290	Unit						145	Unit		
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2	Unit						1	Unit		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan											
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan											
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	umlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan AS	2	Dokumen						1	Dokumen		
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen						1	Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga								1	Lembaga		
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Laporan								1	Laporan		
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN													
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Laporan								2	Laporan		
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN													
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	12	Orang								6	Orang		
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	80	Orang								40	Orang		
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen								1	Dokumen		
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	40	Orang								20	Orang		
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	2000	Orang								1000	Orang		
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160	Orang								80	Orang		
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	Laporan								1	Laporan		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan
- b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan
- c. Koordinasi yang baik antar stakeholder baik internal maupun eksternal BKD.

Terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan akibat wabah COVID-19;
- b. Adanya kegiatan yang tidak dijalankan karena kebijakan daerah;
- c. Adanya perubahan target kinerja terhadap kegiatan.
- d. Hal-hal lain yang bersifat tentatif dan tak dapat diprediksi

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan

serta UPT. Penilaian Kompetensi;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Penataan SDM Aparatur dengan sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah Indeks Sistem Merit.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disajikan dalam format T-C.30 pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD Provinsi Riau					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	10	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau			45	50				52,40				
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			65 (B)	66 (B)				83,93 (B)				
3	Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik			70 %	75 %				99,66 %				
4	Indeks Sistem Merit			236.60	246.60	255.91	266.14	276.79	297.5	300,5	266.14	276.79	

Catatan :
Kriteria Nilai Indeks Profesionalitas ASN
91-100 Sangat Tinggi
81-90 Tinggi
71-80 Sedang
61-70 Rendah
≤60 Sangat Rendah

Kriteria Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
88,31-100 Sangat Baik
76,61-88,30 Baik
65,00-76,60 Kurang Baik
25,00-64,99 Tidak Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama ini mengacu pada dokumen perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dimana tidak terdapat Indikator NSPK, SPM Nasional maupun IKK tertentu.

Sehubungan dengan telah selesainya proses perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang diikuti dengan perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama yang menjadi alat ukur capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk 2 (dua) tahun tersisa yakni 2023 dan 2024 tertuang dalam Bab 3 Tabel 3.1 dokumen ini.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dapat diketahui bahwa terdapat beberapa instruksi presiden, antara lain : melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

Dalam memproyeksikan Rencana Kerja BKD Provinsi Riau Tahun 2024 agar tercapainya sasaran pembangunan SDM serta agar seluruh program dan kegiatan di bidang kepegawaian dapat dirasakan oleh seluruh ASN Provinsi Riau, maka sangat diperlukan adanya pengarusutamaan gender sebagai salah satu pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran BKD Provinsi Riau. Berikut disajikan data terpilah gender BKD Provinsi Riau tahun 2022 yang mengakomodir isu-isu gender di Provinsi Riau :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dinas/Instansi PemerintahanGovernment Agencies	2023		
		Laki-Laki Male	PerempuanFemale	Jumlah Total
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	281	184	465
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	123	71	194
3	Inspektorat Daerah	79	66	145
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	116	87	203
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	67	60	127
6	Badan Pendapatan Daerah	269	195	464
7	Badan Kepegawaian Daerah	56	54	110
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69	40	109
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50	15	65
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	48	21	69
11	Dinas Pendidikan	2636	4960	7596

No	Dinas/Instansi PemerintahanGovernment Agencies	2023		
		Laki-Laki Male	PerempuanFemale	Jumlah Total
1	2	3	4	5
12	Dinas Kesehatan	102	258	360
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	385	135	520
14	Dinas Sosial	98	54	152
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	106	51	157
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15	83	98
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	54	51	105
18	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	176	123	299
19	Dinas Perkebunan	64	36	100
20	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	532	176	708
21	Dinas Perhubungan	91	40	131
22	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	57	39	96
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah	112	97	209
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50	57	107
25	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	69	26	95
26	Dinas Kebudayaan	43	37	80
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	51	56	107
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	71	57	128
29	Dinas Pariwisata	43	61	104
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	45	44	89
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	130	45	175
32	Badan Penghubung	29	38	67
33	Satuan Polisi Pamong Praja	167	19	186
34	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	207	615	822
35	Rumah Sakit Jiwa Tampan	62	164	226
36	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	42	141	183
Total		6.595	8.256	14.851

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PNS Provinsi Riau dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dengan selisih 1.661 orang, dimana laki-laki sebanyak 6.595 orang dan perempuan sebanyak 8.256 orang. Angka 8.256 memiliki makna yang sangat besar, dengan pengertian bahwa

semakin banyaknya jumlah PNS perempuan di Provinsi Riau menggambarkan semakin tingginya peran serta perempuan dalam kancah pengelolaan negara dan pembangunan. Kesetaraan gender ini akan tetap dipertahankan mengingat daya saing sebuah negara sudah tidak lagi melihat jenis kelamin melainkan lebih pada kualitas SDM.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan Terakhir	2023		
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	2	3	4	5
1	Sampai dengan SD	31	4	35
2	SLTP/Sederajat	34	4	38
3	SMA/Sederajat	1162	619	1781
4	Diploma I,II/Akta I,II	29	24	53
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	424	712	1136
6	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	4946	6897	11843
Total		6595	8256	14851

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pada seluruh PNS di Provinsi Riau sangat bervariasi. Untuk pendidikan terakhir SD, SLTP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I,II/Akta I,II lebih di dominasi oleh laki-laki dengan jumlah 31, 34, 1162, dan 29 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan terakhir Diploma III/Akta III/Sarjana Muda, dan Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D sudah didominasi oleh PNS dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini secara garis besar menunjukkan bahwa PNS di Pemerintah Provinsi Riau yang berjenis kelamin perempuan lebih memiliki kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Kepangkatan <i>Hierarcy</i>	2023		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
1	I/A (Juru Muda)	0	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	4	1	5
3	I/C (Juru)	9	2	11
4	I/D (Juru Tingkat I)	27	1	28
Golongan I/Range I		40	4	44
5	II/A (Pengatur Muda)	49	17	66
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	124	59	183
7	II/C (Pengatur)	252	145	397
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	567	290	857
Golongan II/Range II		992	511	1503
9	III/A (Penata Muda)	398	552	950
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	983	1027	2010
11	III/C (Penata)	939	1395	2334
12	III/D (Penata Tingkat I)	1420	2227	3647
Golongan III/Range III		3740	5201	8941
13	IV/A (Pembina Muda)	962	1351	2313
14	IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	709	1095	1804
15	IV/C (Pembina)	90	74	164
16	IV/D (Pembina Tingkat I)	51	14	65
17	IV/E (Pembina Utama)	11	6	17
Golongan IV/Range IV		1823	2540	4363
Jumlah/Total		6595	8256	14851

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 seluruh kategori kepangkatan PNS dipenuhi oleh PNS Provinsi Riau. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdian nya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat

Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2024

dan tepat waktunya. Untuk PNS dengan kategori golongan I dan golongan II masih didominasi oleh laki-laki. Namun untuk golongan III dan golongan IV didominasi jumlahnya oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata PNS perempuan di provinsi riau lebih banyak mendapatkan penghargaan dibandingkan dengan pns laki-laki.

Tabel 2.6.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	2023		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
1	Fungsional Tertentu <i>Specific Functional</i>	3.134	5.399	8.533
2	Fungsional Umum/Staf <i>General Functional</i>	2946	2653	5599
3	Struktural/ <i>Structural</i>			
	Eselon VI/ <i>5th Echelon</i>	0	0	0
	Eselon IV/ <i>4th Echelon</i>	279	113	392
	Eselon III/ <i>3rd Echelon</i>	193	85	278
	Eselon II/ <i>2nd Echelon</i>	42	6	48
	Eselon I/ <i>1st Echelon</i>	1	0	1
Jumlah/ <i>Total</i>		6.595	8.256	14.851

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah PNS perempuan di pemerintah provinsi riau sudah mendapatkan perannya secara signifikan dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural. Hal ini dapat dilihat pada jumlah banyaknya PNS perempuan yang menduduki fungsional tertentu yaitu 5.399 orang dibandingkan dengan PNS laki-laki yaitu 3.134 orang. Selain itu untuk jabatan struktural memang masih didominasi oleh laki-laki. Namun hal tersebut sudah menggambarkan bahwa PNS perempuan juga bisa ikut bersaing dalam jabatan struktural.

Tabel 2.7.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Memasuki Masa Pensiun

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	2019	583	
2	2020	620	
3	2021	459	

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
4	2022	628	
5	2023	595	
Total		2.885	

Tabel 2.8.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Memasuki Masa Pensiun Menurut Jenis Kelamin

No	Data Pensiun	Tahun 2023		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Reguler			
2	Meninggal			
3	Dini			
Total		454	333	787

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Batas usia pensiun atau minimal usia kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum adalah 53 tahun dan maksimal 65 tahun. Hal terebut telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa batas usia PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut masih bergantung pada masing-masing jabatan. Sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional (JF) pensiun dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain : usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, usia 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama, PNS yang berusia di atas 60 tahun dan menduduki JF ahli madya sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 65 tahun, serta PNS yang berusia di atas 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021 sebanyak 787 orang, dimana laki-laki sebanyak 454 orang dan perempuan 333 orang. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa untuk laki-laki yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.9.
Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil
Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah		Jumlah
		laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	2019	13	-	13
2	2020	5	-	5
3	2021	2	-	2
4	2022	7	-	7
5	2023	9	-	9
Total		36	-	36

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diketahui bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan, apabila melanggar peraturan akan dijatuhi hukuman dengan beberapa tingkatan hukuman disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran PNS Provinsi Riau hanya berada pada jenis hukuman disiplin berat dan lebih didominasi oleh PNS laki-laki. Hal ini dilihat pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PNS laki-laki berjumlah 11 orang dan PNS perempuan berjumlah 5 orang.

Tabel 2.10.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Yang Mengikuti Tugas Belajar Menurut Jenis Kelamin

No	Program	Tahun 2023		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	S2 Umum			
	Magister Psikologi Profesi		1	1
2	Spesialis			
	PPDS Kedokteran Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler	1		1
	PPDS Gizi dan Klinik		1	1
	PPDS Ilmu Penyakit Dalam	1		1
	PPDS Anestesiologi dan Reanimasi	1		1
	PPDS Ilmu Bedah	1		1
	PPDS Program Studi Dermatologi dan Venereologi		1	1
Jumlah				
3	S3 Umum			
	DOKTOR Ilmu Lingkungan	1		1
	DOKTOR Perencanaan Wilayah dan Kota	1		1
	DOKTOR Studi Ilmu Ekonomi Pertanian	1		1
	DOKTOR Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan		1	1
	DOKTOR Ilmu Administrasi Publik	1		1
	DOKTOR Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	2		2
4	Spesialis			
	Sub Spesialis Kardiologi Anak		1	1
	Ilmu Kedokteran		1	1
Jumlah		10	6	16

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar masih didomisasi oleh PNS laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah PNS laki-laki yang mengikuti sebanyak 10 orang sedangkan jumlah PNS perempuan yang mengikuti tugas belajar sebanyak 6 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengikuti tugas belajar, semua PNS mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya diskriminasi hak tugas belajar bagi perempuan dan laki-laki di pemerintah provinsi

riau, sehingga diharapkan kedepannya SDM ASN di Pemerintah Provinsi Riau lebih berkualitas dan dapat dibanggakan di kancah nasional dan internasional.

Tabel 2.11.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kompetensi	Tahun 2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional I	1		1
2	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	4	1	5
3	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5	2	7
4	Fasilitasi Diklat Teknis			
	Manajerial	4	1	5
	Fungsional Tertentu	3	1	4
	Fungsional Umum		1	1
Total		17	6	23

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sebanyak 23 orang dengan rincian PNS laki-laki 17 orang dan PNS perempuan sebanyak 6 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua PNS diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya seperti mengikiti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lain-lain yang secara langsung dapat meningkatkan kompetensinya. Namun dalam hal ini untuk pengembangan kompetensi PNS di Provinsi Riau pada tahun 2021 masih didominasi dan diminati oleh PNS laki-laki.

Tabel 2.12.
Jumlah ASN Penyandang Disabilitas Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau

NO	OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	-	
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	
3	INSPEKTORAT DAERAH	-	
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	
11	DINAS PENDIDIKAN	2	
12	DINAS KESEHATAN	-	

NO	OPD	JUMLAH	KETERANGAN
13	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	1	
14	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	-	
15	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	1	
16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	
17	DINAS SOSIAL	-	
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	
21	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	
22	DINAS PERKEBUNAN	-	
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	
24	DINAS PERHUBUNGAN	-	
25	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2	
26	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	
28	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	
29	DINAS KEBUDAYAAN	-	
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	
31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	
32	DINAS PARIWISATA	-	
33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
34	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	
36	BADAN PENGHUBUNG	-	
TOTAL		9	

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2023

Tabel 2.13.
Jumlah ASN Provinsi Riau Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Fungsional

NO	URAIAN	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Administrator Kesehatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Analisis Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Analisis Akuakultur	-	-	-	-	-				1	
5	Analisis Kebijakan	-	-	-	-	-				1	7
6	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Arsiparis	1	1	-	1	-	1	11	16	3	3
8	Asisten Apoteker	-	-	-	-	-					
9	Assessor SDM Aparatur	-	-	-	-	-					
10	Auditor	-	-	-	-	1	-	6	5	4	9
11	Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dokter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dokter Pendidik Klinis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fisikawan Medis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fisioterapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Guru	80	90	70	104	-	-	-	-	-	-
19	Inspektur Ketenagalistrikan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20	Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Mediator Hubungan Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
23	Nutrisionis	-	-	-	-						
24	Pamong Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26	Paramedik Veteriner	-	-	-	-			-	1	1	-
27	Pekerja Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Peneliti	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
29	Penera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pengantar Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pengawas Benih Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pengawas Bibit Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pengawas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	Pengawas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
37	Pengendali Ekosistem Hutan	-	-	-	-						

NO	URAIAN	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
40	Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Penguji Mutu Barang	-	-	-	-						
42	Penyuluh Kehutanan	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
43	Penyuluh Lingkungan Hidup (Pelhi)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8
44	Penyuluh Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Penyuluh Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Penyuluh Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Perawat Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Perekam Medis	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
51	Perekayasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Perencana	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
53	Polisi Kehutanan	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
54	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
55	Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Radiografer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Statistisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Teknik Elektromedis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Widyaiswara	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
63	Empidemiologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Pengelola PJB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Penata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Surveyor Pemetaan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
67	Subtantif Pengawas Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Sanitarian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		92	98	73	109	4	1	21	25	39	42
Jumlah Total ASN		15.415		15.090		14.989		14.923		14.851	
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal fungsional		1,23		1,21		0,03		0,31		0,55	

Tabel 2.14.
Sistem Informasi Kepegawaian Yang Ada dan Yang Akan Dikembangkan

No.	Nama (Aplikasi/ Website)	Fungsi / Kegunaan	Jenis Layanan (Antar Pemerintah/ Ke Masyarakat)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen ASN (SIGMA)	Mengelola database kepegawaian dan layanan administrasi kepegawaian	Antar pemerintah	Memeiliki beberapa Modul layanan kepegawaian
2	Sistem Informasi Kinerja Aparatur Elektronik (e-SIKAP)	Mengelola laporan Kinerja PNS	Antar Pemerintah	Proses Perancanagn ulang karena perubahan regulasi
3	Website	Mengelola data dan informasi dan perundangan serta kebijakan bidang kepegawaian	Masyarakat	
4	Assessment	Mengelola pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	SIGMA	
5	Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik	Mengelola tandatangan elektronik	SIGMA	

Tabel 2.15.
**Rekapitulasi Nilai Kinerja SKP PNS Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2019-2022**

NO	NAMA UNIT KERJA / SKPD	RATA-RATA SKP			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH				
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	80.46	88.99	107.63	baik
	b. Biro Adm Kesejahteraan Rakyat	90.59	90.37	109.50	baik
	c. Biro Hukum	91.52	90.35	109.48	baik
	d. Biro Adm Perekonomian dan Sumber Daya Alam	87.65	88.68	107.21	baik
	e. Biro Adm Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	90.36	91.81	111.01	baik
	f. Biro Organisasi	87.75	87.49	105.59	baik
	g. Biro Umum	88.81	88.6	107.10	baik
	h. Biro Humas, Protokol dan Kerjasama	91.69	92	111.25	baik
2	SEKRETARIAT DPRD	87.73	88.91	107.52	baik
3	INSPEKTORAT	88.09	86.97	104.89	baik
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	89	87	104.93	baik
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	90.45	90.96	110.30	baik

NO	NAMA UNIT KERJA / SKPD	RATA-RATA SKP			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	88.43	88.67	107.20	baik
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	82.34	89.21	107.93	baik
8	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	87.81	88.34	106.75	baik
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	87.5	88.25	106.63	baik
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.44	88.69	107.22	baik
11	DINAS PENDIDIKAN	87.09	87.09	105.05	baik
12	DINAS KESEHATAN	90	89.06	107.72	baik
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	61.61	87.91	106.16	baik
14	DINAS SOSIAL	91.66	91.92	111.15	baik
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89.53	85.22	102.51	baik
16	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	88.58	88.87	107.47	baik
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	87.24	86.98	104.90	baik
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	88.37	89.53	108.36	baik
19	DINAS PERHUBUNGAN	89.64	91.07	110.09	baik
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	85.66	82.59	98.94	baik
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	88.5	90.67	109.91	baik
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	94.41	87.26	105.28	baik
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	87.87	88.74	107.29	baik
24	DINAS KEBUDAYAAN	90.81	89.74	108.65	baik
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	85.88	86.82	104.68	baik
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83.18	86.54	104.30	baik
27	DINAS PARIWISATA	91.24	91.72	110.90	baik
28	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	90.76	85.8	103.30	baik
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	89.52	87.73	105.92	baik
30	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	89.62	89.62	108.48	baik
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	88.39	88.73	107.28	baik
32	BADAN PENGHUBUNG	88.52	92	111.25	baik
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	86.07	86.63	104.43	baik
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	86.31	91.62	110.78	baik
35	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	87.25	87.86	106.10	baik
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	86.37	88.73	107.28	baik
TOTAL DAN RATA-RATA		85.70	88.74	107.29	baik

Tabel 2.16.
PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 - 2024

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	220	374	0	6	6	5	1	147	11	4	3	0
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	140	233	1	2	0	1	2	15	6	0	0	0
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	422	493	7	24	17	26	11	78	24	17	26	11
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	115	174	2	0	1	3	2	67	0	1	3	2
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	105	145	3	1	5	8	3	28	4	14	10	3
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	59	74	3	3	2	1	0	20	3	2	1	0
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73	99	7	8	6	2	7	29	10	8	3	9
8	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	186	212	4	5	11	4	6	31	5	11	3	6
9	INSPEKTORAT	146	197	6	4	13	11	7	58	4	13	11	7
10	DINAS PENDIDIKAN	7506	12456	166	138	218	214	282	798	558	1456	1691	1481
11	DINAS KESEHATAN	293	444	11	10	11	15	11	134	31	11	15	11
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	546	980	9	22	26	13	15	364	54	30	29	27
13	DINAS SOSIAL	169	270	8	26	12	7	6	107	28		7	5
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	195	284	13	21	14	16	7	39	33	18	14	11
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	93	138	5	5	1	5	5	49	5	1	5	5

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	871	2036	51	70	58	46	30	91	418	216	138	106
17	DINAS PERKEBUNAN	88	188	7	10	7	10	2	107	10	7	10	2
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	107	173	7	3	5	2	3	16	8	5	1	0
19	DINAS PERHUBUNGAN	121	241	5	7	3	3	8	55	60	11	10	10
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	76	213	4	1	4	3	3	76	29	9	9	10
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	230	385	14	15	15	18	9	169	15	15	19	9
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	120	164	5	2	8	1	3	49	2	8	1	3
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	112	140	6	6	10	3	5	34	34	38	31	33
24	DINAS KEBUDAYAAN	83	140	2	5	5	5	8	39	18	10	5	8
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	116	225	6	8	6	8	7	116	8	6	8	6
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	143	321	8	5	7	4	6	79	40	34	16	15
27	DINAS PARIWISATA	116	159	0	7	7	6	3	44	6	7	6	3
28	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	314	621	34	22	53	26	11	262	37	42	28	15
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	83	245	11	1	3	1	7	173	1	3	1	7
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	202	277	7	10	7	12	8	59	23	12	11	9
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	210	313	1	10	5	5	8	1	10	5	5	8
32	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	41	69	2	5	1	1	2	30	5	1	1	2

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	55	66	0	3	5	1	1	11	3	5	1	1
34	BIRO HUKUM	40	54	1	1	2	0	1	15	1	2	0	1
35	BIRO PEREKONOMIAN	40	52	0	0	3	1	2	4	8	3	1	1
36	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	62	95	0	0	2	3	1	0	37	2	3	1
37	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	34	62	0	2	2	2	0	29	2	2	2	0
38	BIRO UMUM	112	161	1	4	5	5	3	49	4	5	5	3
39	BIRO ORGANISASI	41	58	0	2	1	1	1	58	0	0	0	0
40	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	64	131	1	4	2	1	2	68	2	1	0	0
41	RSUD ARIFIN ACHMAD	847	4386	16	15	11	15	18	755	516	769	811	688
42	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	233	1332	0	0	1	1	0	48	21	9	4	3
43	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	187	704	1	3	2	4	4	93	147	117	86	106
44	BADAN PENGHUBUNG	69	85	4	5	2	3	3	16	0	0	0	0
Total		15.085	29.669	439	501	585	522	524	4.510	2.241	2.930	3.034	2.628
REALISASI								0	350	353	350	350	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tercermin dalam upaya pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Indeks RB Area 5 Aspek Pemenuhan .
Indeks RB Area 5 Aspek Pemenuhan merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat reformasi birokrasi pemerintah daerah pada area 5 yaitu area Penataan Sistem Manajemen SDM yang hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi. Tingkat Area 5 Aspek Pemenuhan dipengaruhi oleh beberapa penilaian, yaitu:
 - a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari beberapa indikator, antara lain :
 - Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan
 - Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan
 - Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama
 - Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
 - b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - c. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
 - Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
 - d. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - e. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - Penerapan Penetapan kinerja individu
 - Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
 - Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya
 - Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
 - Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
 - Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
 - f. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
 - Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
 - g. Pelaksanaan evaluasi jabatan
 - Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
 - Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ
 - h. Sistem informasi kepegawaian dengan unsur penilaian Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

- 2) Indeks RB Area 5 Aspek Reform dengan beberapa unsur penilaian antara lain :
 - a) Kinerja individu
 - b) Evaluasi jabatan
 - c) Assessment pegawai
 - d) Pelanggaran disiplin pegawai
 - e) Kebutuhan pegawai
 - f) Penyetaraan jabatan
 - g) Manajemen talenta
- 3) Indeks sistem merit

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Kriteria Penilaian Penerapan Sistem Merit antara lain :

 1. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan dan disusun berdasarkan Analisa Jabatan (disusun berdasarkan Anjab dan ABK), dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun.
 2. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain.
 3. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi.
 4. Menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya.
 5. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin.
 6. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan *talent pool*.
 7. Memberi perlindungan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberi pelayanan kepada publik.
 8. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, *assessment center*, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu indeks sistem merit. Upaya pencapaian indikator kinerja dimaksud didukung oleh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Berikut disampaikan beberapa penjelasan terkait indikator kinerja berdasarkan hasil

pencapaian kinerjanya pada tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penilaian KASN pada Tahun 2021, penilaian Indeks sistem merit untuk Provinsi Riau masih berada diangka 297,5 dan sudah melebihi target sebesar 246,06. Sementara untuk tahun 2022, pemerintah provinsi riau juga telah melebihi target capaian, dimana hasil penilaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 300,5 dengan target sebesar 255,91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk pencapaian indeks sistem merit di pemerintah provinsi riau sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi No 70 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17.
Nilai Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2019-2024

No	Kriteria penilaian	Target					Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Sistem merit	236.60	246.06	255.91	266.14	276.79	239.50	297.50	300.50	-	-

Sumber data : KASN 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil penilaian pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian setiap tahunnya seperti pada tahun 2022, dimana dengan target 255.91 dicapai nilai 300.50 (peningkatan sebesar 44,59) . Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah provinsi riau dapat menerapkan impelementasi sistem merit secara komprehensif dan berkelanjutan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai target kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hal ini tentu akan berdampak pada upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu untuk mengelola tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada 2.12 di bawah ini:

Tabel 2.18.
Pemetaan Permasalahan dan Hambatan

NO	Indikator Kinerja Utama	Permasalahan	Hambatan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam	1. Belum optimalnya perencanaan	1. Belum optimalnya ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun) yang berkualitas dan

NO	Indikator Kinerja Utama	Permasalahan	Hambatan
1	2	3	4
	Manajemen ASN	kebutuhan	komprehensif 2. Belum optimalnya ketersediaan rencana kebutuhan pengadaan ASN untuk tahun berjalan 3. Belum optimalnya ketersediaan perencanaan kebutuhan jangka menengah pegawai selama 5 tahun
		2. Belum optimalnya pengadaan pegawai sesuai kebutuhan	1. Belum dilaksanakannya penerimaan CPNS/PPPK sesuai kebutuhan 2. Belum adanya kebijakan internal pergub terkait pengadaan ASN 3. Belum Optimalnya penempatan PNS yang sesuai jabatan yang dilamar
		3. Belum optimalnya perlindungan dan pelayanan	1. Kurangnya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun. 2. Belum maksimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 3. Belum terlaksananya survey indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel
		4. Belum optimalnya sistem informasi	1. Belum comprehensivenya Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai. 2. Belum tersedianya data kepegawaian secara lengkap dan real time
		5. Belum optimalnya promosi dan mutasi	1. Belum adanya kebijakan internal pergub tentang pola karier 2. Belum adanya kebijakan internal pergub tentang mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu kepada rencana suksesi 3. Belum dilaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif
		6. Belum optimalnya pengembangan karir	1. Belum disusunnya standar kompetensi manajerial, bidang, dan sosio kultural untuk setiap jabatan secara berkelanjutan 2. Belum disusunnya profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi 3. Belum dibangunnya talent pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir 4. Belum disusunnya analisis tentang

NO	Indikator Kinerja Utama	Permasalahan	Hambatan
1	2	3	4
			kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai 5. Belum adanya strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN. 6. Belum optimalnya fasilitasi Diklat dalam rangka mengatasi kesenjangan kompetensi dan kualifikasi 7. Belum meningkatnya kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai 8. Belum meningkatnya kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring. 9. Belum optimalnya pendayagunaan asesment center dalam pemetaan potensi dan kompetensi, dan pengisian jabatan dalam rangka promosi, mutasi, demosi, rotasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai
		7. Belum optimalnya manajemen kinerja	1. Belum dilaksanakannya penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja 2. Belum dilakukan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya 3. Belum Optimalnya Penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur 4. Belum adanya kebijakan penggunaan hasil penilaian kinerja bagi penentuan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi, rotasi, diklat)
		8. Belum optimalnya penggajian, penghargaan dan disiplin	1. Masih kurangnya pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya 2. Belum Optimalnya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai 3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial kepada pegawai berprestasi dan berkinerja baik

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2023

Sekalipun adanya permasalahan dan hambatan yang dialami terkait pelaksanaan proses pencapaian target kinerja BKD Provinsi Riau, namun dalam hal ini seluruh target kinerja telah tercapai dengan maksimal sebagaimana data yang telah ditampilkan pada tabel T.C.30 di atas.

Uraian Pemetaan Permasalahan dan Hambatan sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat relevan dan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh BKD

Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2024

Provinsi Riau dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah tidak tercapainya Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan dengan indikator sasaran: Indeks reformasi birokrasi
2. Meningkatnya penerapan *e-government* dengan indikator sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Peluang yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum maksimal;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Kerjasama dengan lembaga lainnya dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (*e-government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah:

1. Implementasi Sistem Merit;
2. Pengadaan PNS untuk pemenuhan kebutuhan formasi;
3. Pengembangan Karier;
4. Penataan Gaji dan Perlindungan;
5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Pengembangan Kelembagaan;
7. Penataan Pegawai sesuai dengan kompetensinya

Peluang dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat relevan dan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Riau dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Beberapa isu-isu penting yang dapat direkomendasikan sebagai catatan strategis sebelum dirumuskannya program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2024 adalah :

1. Masih belum optimalnya waktu pelayanan terhadap ASN
2. Kurangnya kompetensi ASN

3. Belum seluruh ASN berkinerja baik

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merumuskan program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahunan 023 dan 2024 yaitu program kepegawaian. Program tersebut didukung oleh serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Adapun kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat usulan kegiatan baru;
- b. Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap – tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada Rancangan Awal RKPD belum sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat daerah;
- c. Beberapa kegiatan pada Rancangan Awal RKPD masih memiliki target terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang diberikan sehingga dapat diperkirakan tidak akan tercapai dengan pagu dimaksud;
- d. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap target beberapa kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD untuk mengakomodir kebutuhan pencapaian beberapa agenda strategis seperti Fasilitasi Tugas Belajar PNS, Seleksi CPNS dan PPPK, Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Pemetaan Jabatan/Talent Pool, dan lain-lain.

Selain beberapa hal yang dikemukakan di atas, BKD Provinsi Riau perlu melakukan pemetaan kembali terhadap rumusan nomenklatur Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 untuk dilakukan sinkronisasi terhadap dokumen RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Hal ini dikarenakan rumusan program yang ada dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang selanjutnya diturunkan ke dalam RKPD Tahun 2024 masih menggunakan nomenklatur lama sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan BKD Provinsi Riau Tahun 2024 selengkapnya dikemukakan pada tabel 2.19. di bawah ini.

Tabel 2.19.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Riau

No.				Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting		
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
1				2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
03	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	25.288.076.181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	25.374.541.135	
03	1	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	20.118.029.622	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	19.578.690.418	
03	1	102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan	20.118.029.622	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	19.578.690.418	
03	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Layanan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Layanan	130.000.000	
03	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	130.000.000	
03	1	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis Layanan	1.671.056.543,0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis Layanan	2.255.661.393	
03	1	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.954.580	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.096.680,00	
03	1	106	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	316.827.452	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	734.656.869,00	
03	1	106	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	457.230.095	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	332.800.000	
03	1	106	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	175.080.516	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	248.100.000,00	
03	1	106	7	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.836.900	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	148.007.844,00	
03	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	648.127.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	725.000.000,00	
03	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	2.790.790.016	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	3.042.249.324	
03	1	108	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	
03	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	705.204.160	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	737.203.468	

No.				Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	1	108	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	192.500.000	
03	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.085.585.856	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.104.545.856	
03	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	708.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	367.940.000	
03	1	109	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.730.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.730.000	
03	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	342.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	141.580.000	
03	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	229 Unit	238.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	100.000.000	
03	1	109	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84.630.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84.630.000	
03	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	10.037.037.325	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	13.571.174.437	
03	2	101		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Fasilitas Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan	100 Persen	2.283.286.116	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Fasilitas Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan	100 Persen	2.721.523.904	
03	2	101	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	34.850.586	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	77.018.586	
03	2	101	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	728.530.026	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	871.431.030	
03	2	101	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	365.976.646	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	400.241.615	
03	2	101	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	745.429.275	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	838.832.673	
03	2	101	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	37.049.845	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	95.500.000	

No.				Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03	2	101	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	249.508.650	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	250.000.000	
03	2	101	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	24.753.208	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	43.500.000	
03	2	101	12	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	97.187.880	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	145.000.000	
03	2	102		Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen	924.305.824	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen	1.241.507.837	
03	2	102	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	278.834.118	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	365.977.488	
03	2	102	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	363.922.413	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	477.557.519	
03	2	102	3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	281.549.293	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	397.972.830	
03	2	103		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	5.954.674.776	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	8.243.226.146	
03	2	103	2	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	570.526.333	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	700.000.000	
03	2	103	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	92.373.601	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	127.949.540	
03	2	103	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	2.648.329.724	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	3.423.065.124	
03	2	103	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	698.057.295	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	959.217.659	
03	2	103	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	6 Orang	1.021.719.778	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	6 Orang	1.181.867.778	
03	2	103	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	40 Orang	677.686.449	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	40 Orang	1.460.976.449	
03	2	103	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	245.981.596	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	390.149.596	
03	2	104		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan	100 Persen	874.770.609	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan	100 Persen	1.364.916.550	
03	2	104	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	46.578.737	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	99.500.000	

No.				Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03	2	104	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	517.514.190	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	815.916.550	
03	2	104	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000 Orang	51.896.792	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000 Orang	99.500.000	
03	2	104	7	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	223.925.047	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	235.000.000	
03	2	104	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	34.855.843	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	115.000.000	
JUMLAH								35.325.113.506	JUMLAH				38.945.715.572	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada tugas pokok dan fungsi yaitu terkait administrasi kepegawaian, pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja bagi Aparatut Sipil Negara. Sehingga berdasarkan dengan hal tersebut, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.20
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
BKD Provinsi Riau Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang termasuk di dalamnya dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, wajib memperhatikan kebijakan – kebijakan di tingkat pusat terutama dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan urusan administrasi dan pengembangan kompetensi kepegawaian. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau meliputi 5 (lima) Kementerian/ Lembaga yaitu Kemepan - RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.1.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki visi ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”***, didukung oleh 9 Misi, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian PANRB sebagai kementerian yang membidangi tentang pendayagunaan aparatur negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong profesionalisme dan integritas dari aparatur negaranya agar mencapai pemerintahan yang berkelas dunia.

Dalam mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, Kementerian PANRB melakukan pembenahan birokrasi internal, menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping berbasis elektronik. Membangun SDM, mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, menciptakan sistem pengawasan, mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, yaitu:

- 1) Integritas
- 2) Profesional
- 3) Akuntabel
- 4) Melayani
- 5) Inovatif
- 6) Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)

Beberapa program strategis Kementerian PAN-RB yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
- 2) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Beberapa hal yang dikemukakan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

3.1.2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Kebijakan strategis BKD termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020- 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024.

Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
- 2) Penyelenggaraan manajemen ASN,
- 3) Penyimpanan informasi pegawai ASN,
- 4) Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
- 5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Menjabarkan misi pembangunan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.

- 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis.
- 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
- 4) Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

Beberapa program strategis BKN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola (Co-Program bersama LAN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

Gambaran kebijakan strategis BKN tahun 2020-2024 di atas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan.

3.1.3 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

LAN menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai kebijakan dalam menindaklanjuti isu-isu strategis dan diarahkan pada penguatan LAN sebagai institusi pembelajar berkelas dunia melalui pengembangan kompetensi aparatur, kebijakan dan inovasi Administrasi Negara dalam mendukung pembangunan nasional. Perumusan arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan oleh LAN untuk mewujudkan visi dan misi LAN dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional, terutama yang telah digariskan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional, LAN secara langsung berkontribusi pada agenda pembangunan “Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, sehingga visi LAN juga harus diarahkan pada pencapaian agenda pembangunan tersebut, yaitu untuk memastikan negara terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Secara spesifik, LAN juga merupakan salah satu aktor utama dalam program reformasi birokrasi nasional. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah menetapkan visi reformasi birokrasi untuk “mewujudkan pemerintahan berkelas dunia”. Dengan demikian, LAN juga harus mengarahkan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut.

Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan program reformasi birokrasi nasional, serta mendukung visi RPJMN tahun 2020-2024, visi LAN 2020-2024 merupakan gambaran atas kondisi, posisi, dan peran LAN dalam kedua kerangka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan *World Class Government* Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mewujudkan visi LAN dan mendukung visi Presiden, LAN melaksanakan misi Presiden dan wakil presiden nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia yaitu.

- 1) Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional
- 2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten
- 3) Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi
- 4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Beberapa program strategis LAN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (Co-Program bersama BKN dan KASN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dengan adanya sinergitas ini, diharapkan ASN kelas dunia dapat terwujud khususnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

3.1.4 Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara yang disingkat KASN merupakan lembaga independen yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Visi yang ingin diwujudkan KASN adalah ***“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”***

Sedangkan misi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut adalah :

- 1) Mengawasi pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas, serta penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN
- 2) Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, profesional dan Akuntabel.

Dengan mengacu pada rencana strategis KASN diketahui bahwa Sistem Merit

dalam Manajemen ASN merupakan pilar utama mewujudkan ASN Kelas Dunia. Untuk itu, BKD Provinsi Riau, dalam merumuskan program dan kegiatan tidak terlepas dari 8 agenda Sistem Merit, yaitu:

- 1) Penerapan aspek perencanaan kebutuhan pegawai
- 2) Penerapan aspek pengadaan pegawai
- 3) Penerapan aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai.
- 4) Penerapan aspek promosi, rotasi, dan mutasi
- 5) Penerapan aspek manajemen kinerja pegawai
- 6) Penerapan aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin
- 7) Penerapan aspek perlindungan dan pemberian kemudahan
- 8) Penerapan aspek sistem informasi kepegawaian.

Beberapa program strategis KASN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaan Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (Co-Program bersama BKN dan LAN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

3.1.5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud, maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi setiap dua tahun sekali.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk untuk menyelenggarakan Stranas PK. Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PK.

Terdapat 3 Fokus Utama dalam Stranas PK yaitu:

- 1) Perizinan dan Tata Niaga
- 2) Keuangan Negara

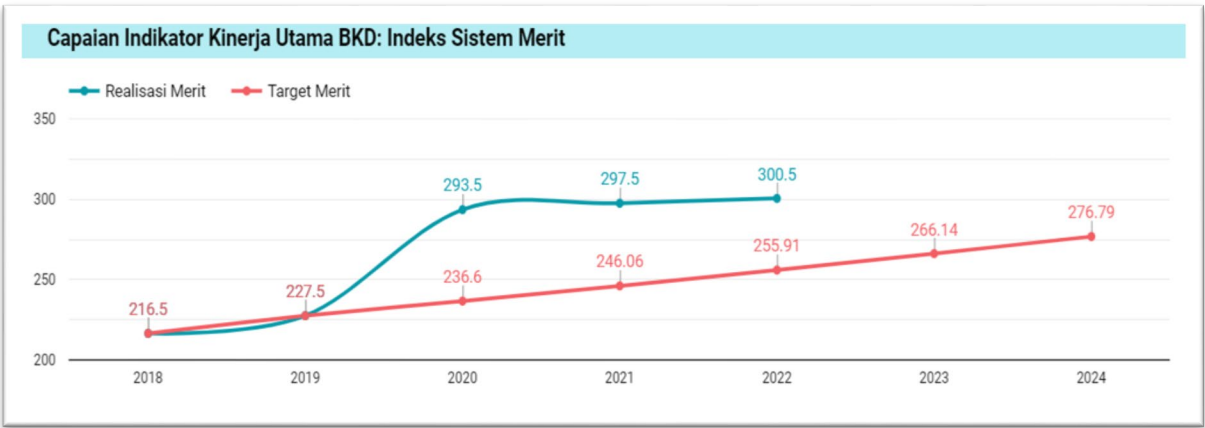
3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu fokus utama karena akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan fokus strategi ini yaitu:

- 1) Berkurangnya Praktik Jual-Beli Jabatan sehingga meningkatkan Kinerja dan manajemen ASN yang profesional
- 2) Pelayanan publik menjadi lebih transparan, cepat, mudah karena berkurangnya gratifikasi
- 3) Pengawasan internal menjadi lebih objektif, independen
- 4) Kelembagaan Pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien anggaran
- 5) Pengambilan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan publik efektif, terpadu, dan aman karena pengambilan keputusan lebih cepat.

Salah satu sub aksi dalam Stranas PK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Riau adalah Percepatan Sistem Merit. Selama ini, mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering ditemukan dilakukan dengan cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepegawaian. Belum lagi dengan manajemen data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi. Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

BKD Provinsi Riau berkomitmen dan berkontribusi dalam pelaksanaan Aksi PK di Provinsi Riau khususnya pada Area: Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi, pada Aksi: Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sub Aksi: Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit. Salah satu komitmen BKD Provinsi Riau dalam pelaksanaan Aksi PK adalah dengan menjadikan Sistem Merit dalam Manajemen ASN sebagai Sasaran Strategis Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Sistem Merit yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Capaian Indeks Sistem Merit Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana data di bawah ini (Sumber: KASN)



Gambar 3.1. Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit Provinsi Riau

Mengingat pentingnya sistem merit sebagai kebijakan nasional dan rencana aksi KPK, maka Pemerintah Provinsi Riau merespon kebijakan dimaksud pada

penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan yang ada. Ke depannya diharapkan implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN dapat sepenuhnya terlaksana di Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 sebagai tindak lanjut dari perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019- 2024. Tujuan dan sasaran tersebut efektif diimplementasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2023 dan 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan maupun evaluasi program dan kegiatan. Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Penataan SDM Aparatur		Indeks RB Area 5 Aspek Pemenuhan	2.93	2.95
			Indeks RB Area 5 Aspek Reform	2.10	2.25
		Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	266.14	276.79

Sumber: Perubahan Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Isu Strategis Nasional seperti implementasi Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN, peningkatan pelayanan publik, dan sebagainya
- b. Program strategis Kementerian/Lembaga terkait SDM aparatur
- c. Tema dan fokus prioritas dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD 2024
- d. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah;
- e. Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan

- f. Target Renstra BKD Provinsi Riau sampai Tahun 2024
- g. Penyesuaian terhadap kondisi eksisting seperti adaptasi kebiasaan baru dampak pandemi Covid-19.

Adapun uraian mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Kepegawaian Daerah

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 5) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
- 6) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 7) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 8) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 3) Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

- 1) Pengelolaan Assessment Center
- 2) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- 3) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 4) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
- 5) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
- 6) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- 7) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- 3) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- 4) Pembinaan Disiplin ASN
- 5) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Rencana program dan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas sudah sesuai dengan nominatif program dan kegiatan beserta anggaran dan target kinerja sebagaimana terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2024. Hal ini sudah sesuai dengan analisis kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Apabila terjadi perubahan yang signifikan pada Rancangan Awal RKPD maka akan berdampak pada tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan BKD Provinsi Riau.

Selanjutnya, rumusan rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Riau Tahun 2024 beserta indikator, target, pagu, serta perkiran maju Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	25.288.076.181			100 Persen	25.044.041.131
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		1 Laporan	20.118.029.622			1 Laporan	19.578.690.418
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		104 Orang/ Bulan	20.118.029.622				19.578.690.418
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis	1.671.056.543				2.255.661.389
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	49.954.580,00				67.096.680
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	316.827.452,00				734.656.865
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	457.230.095				332.800.000
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	175.080.516,00				248.100.000
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	23.836.900,00				148.007.844
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	648.127.000,00				725.000.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		4 Jenis	2.790.790.016				2.841.749.324
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	705.204.160				737.203.468
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.085.585.856				2.104.545.856
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		4 Jenis	708.200.000				367.940.000
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	41.730.000				41.730.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	342.940.000				141.580.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		229 Unit	238.900.000				100.000.000
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	84.630.000				84.630.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan		100 Persen	10.037.037.325			100 Persen	13.571.174.437
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan		100 Persen	2.283.286.116				2.721.523.904
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	34.850.586				77.018.586
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	728.530.026				871.431.030
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 Dokumen	365.976.646				400.241.615
5.03.02.1.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga	745.429.275				838.832.673
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		1 Dokumen	37.049.845				95.500.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	249.508.650				250.000.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 Dokumen	24.753.208				43.500.000
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan	97.187.880				145.000.000
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN		100 Persen	924.305.824				1.241.507.837
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		1 Dokumen	278.834.118				365.977.488
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 Laporan	363.922.413				477.557.519

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1 Dokumen	281.549.293				397.972.830
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN		100 Persen	5.954.674.776				8.243.226.146
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>		1 Dokumen	570.526.333				700.000.000
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		1 Dokumen	92.373.601				127.949.540
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		1 Dokumen	2.648.329.724				3.423.065.124
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		1 Dokumen	698.057.295				959.217.659
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN		7 Orang	1.021.719.778				1.181.867.778
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN		55 Orang	677.686.449				1.460.976.449
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1 Dokumen	245.981.596				390.149.596
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan		100 Persen	874.770.609				1.364.916.550
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	46.578.737				99.500.000
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		20 Orang	517.514.190				815.916.550
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		1000 Orang	51.896.792				99.500.000
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		80 Orang	223.925.047				235.000.000
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 Laporan	34.855.843				115.000.000
JUMLAH					35.325.113.506				38.615.215.568

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat teknis operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan daerah Provinsi Riau yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 dirumuskan kembali dalam format TC. 33 tabel 4.1 berikut.

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						35.325.113.506,00							38.615.215.568,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						35.325.113.506,00							38.615.215.568,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						35.325.113.506,00							38.615.215.568,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	25.288.076.181,00						-	25.044.041.131,00	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.118.029.622,00			-	-	-	-	19.578.690.418,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104.00 Orang/ Bulan	20.118.029.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.578.690.418,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.671.056.543,00			-	-	-	-	2.255.661.389,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	49.954.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.096.680,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	316.827.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		734.656.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	457.230.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		332.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	175.080.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		248.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1.00 Paket	23.836.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		148.007.844,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1.00 Laporan	648.127.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		725.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.790.790.016,00			-	-	-	-	2.841.749.324,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	705.204.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		737.203.468,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	2.085.585.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.104.545.856,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	708.200.000,00			-	-	-	-	367.940.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1.00 Unit	41.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14.00 Unit	342.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		141.580.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				229 Unit	238.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	84.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		84.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	10.037.037.325,00						-	13.571.174.437,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	2.283.286.116,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-	-	2.721.523.904,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1.00 Dokumen	34.850.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		77.018.586,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1.00 Dokumen	728.530.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		871.431.030,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1.00 Dokumen	365.976.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik	-		400.241.615,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1.00 Lembaga	745.429.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		838.832.673,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1.00 Dokumen	37.049.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		95.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	249.508.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1.00 Dokumen	24.753.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		43.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1.00 Laporan	97.187.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	924.305.824,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-	-	1.241.507.837,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1.00 Dokumen	278.834.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		365.977.488,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2.00 Laporan	363.922.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		477.557.519,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1.00 Dokumen	281.549.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		397.972.830,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	5.954.674.776,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-	-	8.243.226.146,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1.00 Dokumen	570.526.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1.00 Dokumen	92.373.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		127.949.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1.00 Dokumen	2.648.329.724,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		3.423.065.124,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1.00 Dokumen	698.057.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		959.217.659,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				7.00 Orang	1.021.719.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		1.181.867.778,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				55.00 Orang	677.686.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		1.460.976.449,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1.00 Dokumen	245.981.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		390.149.596,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	874.770.609,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-	-	1.364.916.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.00 Dokumen	46.578.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		99.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20.00 Orang	517.514.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		815.916.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				1000.00 Orang	51.896.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		99.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				80.00 Orang	223.925.047,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan publik	-		235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1.00 Laporan	34.855.843,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Pelayanan publik	-		115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	J U M L A H							35.325.113.506,00							38.615.215.568,00	

BAB V PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 ini disusun dengan berkoordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Dengan disusunnya dokumen renja ini diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2024 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024.

Demikianlah Renja Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2024.

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

 **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU** 

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650904 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172 - 848593 - 33073 Fax (0761) (0761) 21172 - 848593 - 33073
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kpts.900/BKD/1.1/XII/2022/1736

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang Tim Penyusun Renja Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Perovinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 30);

13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Desember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650904 199703 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : Kpts.900/BKD/1.1/XII/2022/
Tanggal : 30 Desember 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Ikhwan Ridwan, SH., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
2	Ketua	T. Faisyal, SE	Sekretaris
	Sekretaris	Harry Prabowo, S.STP	Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan Program
	Anggota Sekretariat	Mustika Lyza, S.STP., M.Si	Perencana Muda
	Anggota Sekretariat	Matwimiyadi, SKM., M.Kes	Perencana Pertama
	Anggota Sekretariat	Nanang Kusnadi, SE	Perencana Pertama
	Anggota Sekretariat	Satria Nugraha, S.STP	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
	Anggota Sekretariat	Fanny Ramadhani, S.STP	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
	Anggota Sekretariat	Prima Putra, A.Md	Pengelola Program dan Kegiatan
	Operator	Andri Sispika	Operator Komputer
	Operator	Rulianto	Operator Komputer
4	Kelompok Kerja Sekretariat		
	Koordinator	Harry Prabowo, S.STP	Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan Program
	Anggota	Zul Anshari, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
	Anggota	Nidya Elvinsari, S.STP., M.Si	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Kelompok Kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
	Koordinator	Sri Marleni, SE	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian
	Anggota	Delina, SH. MM	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Iis Hermawati, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Ferry Elwind, S.Pi, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
6	Kelompok Kerja Bidang Mutasi		
	Koordinator	Wahyu Qurniawan, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Mutasi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
	Anggota	Heri Permana, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Murina Utri, SP, M.IP	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Wike Kastira, S.IP	Analisis SDM Aparatur Muda
7	Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Aparatur		
	Koordinator	Nella Novita, M.Acc	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
	Anggota	Andi Husnadi, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Sulastri Nelly Astuti, S.E	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Gunturwitovta Asri, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
8	Kelompok Kerja Bidang Pendayagunaan Dan Pembinaan		
	Koordinator	T. Hevi Ikhwanasyah., MH	Kepala Bidang Pendayagunaan Dan Pembinaan
	Anggota	M. Muchti N, S.IP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Didi Yuni Aji., SH	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Fitriana, SE, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
9	Kelompok Kerja Penilaian Kompetensi		
	Koordinator	Budi Fakhri, S.Psi	Kepala UPT. Penilaian Kompetensi
	Anggota	Iqbal Lesmana Putra, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt. Penilaian Kompetensi
	Anggota	Jeffri Firdaus Arief, SE	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
	Anggota	Indra Rosadi, S.Pdi, M.Si	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Desember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650904 199703 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : Kpts.900/BKD/1.1/XII/2022/1736
Tanggal : 30 Desember 2022

AGENDA KERJA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

NO	AGENDA	JADWAL
1	2	3
RENCANA KERJA TAHUN 2024		
1	Persiapan Penyusunan Renja	Desember 2022
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Januari 2023
3	Penyusunan Rancangan Renja	Januari 2023
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Februari 2023
5	Penyempurnaan Rancangan Renja	Maret 2023
6	Perumusan Rancangan Akhir Renja	Mei 2023
7	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023		
1	Persiapan Penyusunan Perubahan Renja	Juni 2023
2	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Juli 2023
3	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Agustus 2023

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650904 199703 1 001

FORM VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2024

I. PENYAJIAN RENJA PD

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
1	COVER	JUDUL COVER : “RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024	√		
2	PERGUB PENETAPAN	Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024		√	
3	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	√		
4	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	√		
5	BAB I PENDAHULUAN				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang,	√		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.			
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	√		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	√		
6	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;			

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan Tabel T-C.29	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan Tabel T-C.30 1. Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2. Tabel Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lihat data RPJMD dan penyesuaian target di 2022 pilih indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan urusan perangkat daerah terkait lampiran 1	√ √		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		3. Tabel Capain Indikator Kinerja Pelayanan Umum (Lihat data terlampir 2 dan pilih kinerja pelayanan umum berdasarkan urusan perangkat daerah terkait) data dari 2019-2024 4. Tabel Capaian SPM 5. Tabel Capaian IKK 6. Tabel Data data perkembangan kegiatan (contoh : Data Perkembangan BUMDES, Data Perkembangan Statsu Desa, Data Pelatihan ASN dll sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi Peranngkat Daerah) Catatan : • Untuk setiap tabel dibuatkan narasi penjelasan terhadap tabel • Untuk SPM dan IKK bagi perangkat daerah yang mempunyai capaian SPM dan IKK	√ - - -		1. Belum ada Data Jumlah ASN disabilitas berdasarkan jenis disabilitas, perangkat daerah, jenis jabatan dan kualifikasi Pendidikan 2. Tabel PNS yang memasuki masa pensiun dibuat tidak sampai pada tahun 2024 (untuk 2024 masukkan angka proyeksi PNS yang akan pensiun dan tabel disandingkan dengan jumlah formasi serta jumlah kondisi PNS yang ada) 3. Belum ada tabel kebutuhan

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
					formasi s/d 2024 4. Belum ada tabel pengembangan kompetensi berdasarkan jenis kompetensi (untuk diklat teknis dan fungsional agar diuraikan per jenis pelatihan) s/d 2022 5. Belum ada tabel data jumlah ASN yang sudah dilakukan uji kompetensi per perangkat daerah per jabatan 6. Belum ada tabel data terkait sistem informasi kepegawaian yang ada dan yang akan dikembangkan kedepannya 7. Belum ada tabel data ASN yang sudah menginput pada aplikasi SIGMA (atau yang sudah melakukan update data kepegawaian per perangkat daerah) 8. Belum ada Data perkembangan kinerja ASN

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
					Provinsi Riau s/d 2022 9. Belum ada Data perkembangan kepangkatan pegawai 10. Belum ada Data perkembangan karir PNS
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	√		
	2.4. Review terhadap RKPD	1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut		√	- Agar ditambahkan narasi apabila ada perubahan dari kondisi awal

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda; Menggunakan Tabel T-C.31			
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Menggunakan Tabel T-C.32	√		
7	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	√		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas	√		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah			
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan Tabel T-C.33	√		
8	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2023.	√		
9	BAB V PENUTUP	1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3.Rencana tindak lanjut. 4.Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah	√		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap perangkat daerah yang bersangkutan. 5. Tanggal dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah 31 Agustus 2023	√		
10	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Sandingan KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 dengan PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	√	√	

Pekanbaru, 28 Agustus 2023

**PERANGKAT DAERAH :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

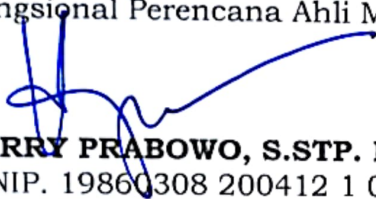
Sekretaris,

T. FAISYAL, SE
NIP. 19700525 199703 1 004

**DIVERIFIKASI OLEH :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU**
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

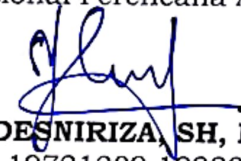
RAJA JUARISMAN,ST., M.Si
NIP. 19770611 200012 1 002

Fungsional Perencana Ahli Muda



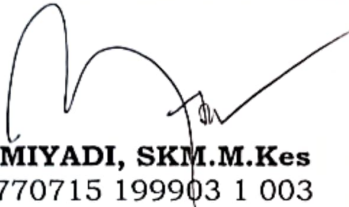
HARRY PRABOWO, S.STP. M.E
NIP. 19860308 200412 1 001

Fungsional Perencana Ahli Madya



DESNIRIZA, SH, M.Si
NIP. 19721209 199803 2 003

Fungsional Perencana Ahli Muda



MATWIMIYADI, SKM.M.Kes
NIP. 19770715 199903 1 003

Fungsional Perencana Ahli Muda



ARI DIANUARI
NIP. 19810103 200902 1 002

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 DENGAN PERMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023						Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum (Persen)	100	25.288.076.181,00
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)	1	20.118.029.622,00
	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	104	20.118.029.622,00	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	104	20.118.029.622,00
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	6	1.671.056.543,00
	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	49.954.580,00	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	49.954.580,00
	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	316.827.452,00	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	316.827.452,00
	5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	457.230.095,00	5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	457.230.095,00
	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	175.080.516,00	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	175.080.516,00
	5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	23.836.900,00	5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	23.836.900,00
	2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	648.127.000,00	2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	648.127.000,00
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	4	2.790.790.016,00
	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	41.730.000	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	41.730.000
	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	342.940.000	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	342.940.000

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023						Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	299	238.900.000
	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	84.630.000	5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	84.630.000
	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	1.387.296.400,00	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	1.387.296.400,00
	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	2.300.000.000,00	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	2.300.000.000,00
	5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	532.330.000,00	5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	532.330.000,00
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan (Persen)	100	10.037.037.325,00
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan (Persen)	100	2.283.286.116,00
	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	34.850.586	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	34.850.586
	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	728.530.026	5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	728.530.026
	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1	365.976.646	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1	365.976.646
	5.03.02.1.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	745.429.275	5.03.02.1.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	745.429.275

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023						Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	1	37.049.845	5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	1	37.049.845
	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	249.508.650	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	249.508.650
	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	24.753.208	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	24.753.208
	5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1	97.187.880	5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1	97.187.880
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN				5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN (Persen)	100	924.305.824
	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	1	278.834.118	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (Dokumen)	1	278.834.118
	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Laporan)	2	363.922.413	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Laporan)	2	363.922.413
	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	281.549.293	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	281.549.293
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN				5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN (Persen)	100	5.954.674.776
	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i> (Dokumen)	1	570.526.333	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i> (Dokumen)	1	570.526.333

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023						Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.02.1.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1	92.373.601	5.03.02.1.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1	92.373.601
	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	1	2.648.329.724	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (Dokumen)	1	2.648.329.724
	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1	698.057.295	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1	698.057.295
	5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (Orang)	7	1.021.719.778	5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (Orang)	7	1.021.719.778
	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Orang)	55	677.686.449	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Orang)	55	677.686.449
	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Dokumen)	1	245.981.596	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Dokumen)	1	245.981.596
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan (Persen)	100	874.770.609
	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	46.578.737	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	46.578.737
	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	20	517.514.190	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	20	517.514.190
	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1000	51.896.792	5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1000	51.896.792

Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023						Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2024	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	80	223.925.047	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	80	223.925.047
	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	34.855.843	5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	34.855.843